

## TAJUK RENCANA

### Menanti Embarkasi Haji

DAERAH Istimewa Yogyakarta (DIY) akan segera mempunyai embarkasi haji sendiri. Hal ini menyusul beroperasinya Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) atau Yogyakarta International Airport (YIA) di Temon Kulonprogo. Bandara ini dinilai memenuhi syarat untuk menjadi embarkasi, karena bisa digunakan untuk mendarat pesawat berbadan lebar.

Rencana penggunaan YIA sebagai embarkasi haji sudah dikomunikasikan pihak Kementerian Agama RI dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X beserta jajarannya, Rabu (4/11). Sebagai bagian dari embarkasi adalah adanya asrama haji yang representatif, dengan masa tempuh menuju bandara maksimal satu jam. Terkait hal ini Gubernur DIY beserta jajaran terkait sedang mencari lokasi yang tepat, dengan luas tanah 5 hektare sampai 10 hektare.

Rencana menjadikan BIY sebagai embarkasi dan pembangunan asrama haji patut kita sambut dengan gembira. Sebab, kalau sudah terwujud akan menimbulkan *multiplier effect* yang besar, baik bagi kegiatan sosial-keagamaan maupun perekonomian, hingga pariwisata. Di satu sisi, bagi umat Islam DIY dan sekitarnya yang akan berangkat haji tidak perlu jauh-jauh menuju Asrama Haji Donohudan Boyolali untuk persiapan penerbangan, sehingga biaya transportasi lokal bisa berkurang. Di sisi lain akan muncul peluang bisnis, antara lain terkait konsumsi bagi calon haji, kuliner, maupun oleh-oleh haji.

Pemanfaatan asrama haji sebenarnya bukan hanya saat menjelang keberangkatan haji maupun ketika pemuatan, tetapi juga bisa sepanjang tahun. Di luar musim haji, kamar-kamar yang tersedia bisa disewakan untuk wisatawan maupun bagi mereka yang transit karena menunggu jadwal penerbangan. Begitu juga ruangan yang ada. Apalagi kalau kompleks asrama dilengkapi fasilitas manasik haji maupun alat peraga praktik manasik haji yang representatif. Fasilitas ini bisa dimanfaatkan para pengelola Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah (KBIHU) untuk melakukan praktik manasik haji, sekaligus untuk mengenalkan secara langsung kepada jemaahnya tempat yang akan mereka gunakan saat akan berangkat haji nanti.

Sebagaimana diketahui, sampai saat ini di DIY belum ada tempat praktik manasik haji yang representatif. Alat peraga, misalnya miniatur Ka'bah di Asrama Haji DIY Jalan Ringroad Utara masih belum utuh menggambarkan yang sebenarnya. Begitu juga yang dimiliki tiap KBIHU. Selama ini banyak KBIHU di DIY yang melaksanakan praktik manasik haji di Donohudan, meski sebenarnya alat peraganya belum sempurna menggambarkan yang sebenarnya. Belakangan banyak yang melaksanakan praktik manasik haji di tempat manasik eksklusif Fatimah Az Zahra Gunungpati Semarang, karena fasilitasnya sudah mendekati yang sebenarnya, namun begitu urut-urutan, khususnya posisi replikasi Masjid Nabawi, belum sesuai lokasi geografis yang sebenarnya.

Karena itu, Asrama Haji DIY yang akan dibangun nanti perlu dirancang dengan sedemikian rupa. Selain ada asrama dan ruang penyambutan ruang pemberangkatan, perlu dilengkapi fasilitas praktik manasik haji yang mendekati gambaran yang sebenarnya, baik bentuk replikasi maupun urutan-urutan lokasinya. Kalau lahan yang digunakan memadai, misalnya 10 hektar, kiranya tidak terlalu sulit dalam merancang. Misalnya dimulai dengan replika tempat pemeriksaan imigrasi, replikasi Masjid Nabawi, replika Masjidil Haram lengkap, sampai lokasi Arafah-Muzdalifah-dan Mina (termasuk replika tempat lempar jumrah). Juga tempat-tempat *miqot* atau menjatuhkan niat umrah/haji (Masjid Bir Ali, Masjid Tan'im, Masjid J'ranah, dan Masjid Hudaibiyah).

Kalau semua itu sudah terwujud, dipastikan Asrama Haji DIY yang baru tidak hanya untuk para calon haji yang akan terbang melalui Embarkasi YIA dan untuk kegiatan praktik manasik haji, tetapi sekaligus juga menjadi tempat wisata. Hal ini sudah terbukti di tempat manasik haji Fatimah Az-Zahra, di mana setiap hari dibanjiri wisatawan. Tempat parkir mobil yang luas itu dari pagi hingga sore selalu penuh kendaraan wisatawan.

Harapannya, semoga segera didapatkan lahan untuk lokasi yang mencukupi dan Embarkasi Haji YIA beserta Asrama Haji dengan fasilitasnya yang lengkap bisa segera terwujud. □

# Membangun Kesadaran Bencana Tsunami

TANGGAL 5 November ditetapkan PBB sebagai Hari Kesadaran Tsunami Dunia (*World Tsunami Awareness Day/WTAD*) sejak Desember 2015. Tsunami memang jarang terjadi, namun jumlah korban dan kerugian yang ditimbulkan sangatlah besar. Secara khusus, tsunami di Aceh (Samudra Hindia) 2004 dijadikan patokan PBB untuk menetapkan WTAD. Mengingat korban dan kerugian terjadi tidak hanya di Aceh, tetapi juga di Thailand, Srilanka, India bahkan hingga Maldives dan Somalia.

Memasuki tahun ke-6 WTAD, PBB mengajak warga dunia sadar terhadap bencana tsunami, khususnya dalam membangun strategi pengurangan risiko. Sasaran WTAD tahun 2020 yaitu meningkatkan jumlah negara yang menerapkan strategi pengurangan risiko di tingkat lokal dan nasional. PBB berharap tahun 2030, manakala 50% populasi dunia tinggal di kawasan pesisir yang rawan tsunami, mereka telah memiliki kesiapsiagaan menghadapinya.

WTAD menjadi penting bagi DIY, mengingat panjang pesisir selatan sekitar 113 km dan keberadaan bandara internasional. Di sisi lain, sebuah laporan penelitian PTN ternama menyimpulkan adanya potensi tsunami 20 meter di pantai selatan Jawa. Apakah Pemda DIY telah memiliki rencana strategis sebagaimana ajakan WTAD?

#### Keselamatan Manusia

WTAD menempatkan keselamatan manusia di atas segalanya, termasuk aset yang mungkin nilai ekonominya lebih dari 12 digit. PBB mencatat, 100 tahun terakhir telah terjadi 58 kali tsunami dan merenggut lebih dari 260.000 jiwa atau 4.600 jiwa setiap tsunami. Angka tersebut menempatkan tsunami 'setara' dengan bencana berskala besar seperti kelaparan, pandemi atau kecelakaan PLTN.

Strategi pengurangan risiko merupakan jawaban paling tepat untuk menyelamatkan manusia. Pemda ber-

#### Boy Rahardjo Sidharta

sama masyarakat harus bahu-membahu menetapkan dan menerapkan strategi tersebut, dengan mempertimbangkan kekhasan daerah setempat. Unsur keselamatan manusia, secara kreatif dan inovatif, diberikan tempat tertinggi dalam rencana strategis tersebut.

Membangun kesadaran akan bencana wajib dilakukan secara teratur, terencana, berulang, dan berkelanjutan.



KR-LOKO SANTOSO

Namun yang sering terjadi yakni alat peringatan dini rusak/hilang dan diketahui setelah terjadi tsunami atau pelatihan digalakkan di berbagai instansi. Apabila itu yang terjadi, berarti kita memang belum memiliki kesadaran bencana tsunami.

#### Literasi Bencana

Peristiwa tsunami di Indonesia banyak yang dicatat dalam literatur dunia. Tsunami selat Sunda akibat letusan Gunung Krakatau tahun 1883 menimbulkan jumlah korban jiwa besar yaitu 36.000 orang. Disusul tsunami Aceh tahun 2004 yang merenggut 227.000 jiwa dan tsunami Palu tahun 2018 yang unik karena disertai fenome-

na likuefaksi. Catatan-catatan tersebut boleh jadi tidak banyak diketahui warga Indonesia, yang selayaknya memiliki literasi bencana. Karena letak geografis-geologis kepulauan Indonesia yang memang rawan bencana.

Literasi bencana menjadi kunci penting dalam upaya membangun kesadaran bencana. Literasi bencana warga DIY perlu terus ditingkatkan, mengingat DIY merupakan kawasan dengan potensi bencana alam tinggi berupa letusan gunung berapi, gempa tektonik dan lainnya. Semakin baik tingkat literasi bencana, maka semakin banyak manusia yang terlindungi dari ancaman bencana, khususnya tsunami.

'Kekayaan' peristiwa tsunami memberi peluang bagi Pemda DIY untuk mendidik semua warganya dalam membangun kesadaran terhadap bencana. Membangun kesadaran bencana dengan tujuan mengurangi risiko, khususnya keselamatan manusia perlu dilakukan secara kreatif-inovatif. Kajian ilmiah dan pengalaman warga dalam menghadapi tsunami menjadi modal penting menyusun strategi pengurangan risiko. Rencana strategi pengurangan risiko tidak sekadar syarat untuk mendapatkan anggaran khusus kawasan rawan bencana, tetapi merupakan pengejawantahan kesadaran bencana yang sistematis. □

*\*) Boy Rahardjo Sidharta MSc, Pendidik di Fakultas Teknobiologi Universitas Atma Jaya Yogyakarta; Koordinator Diklat Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia (ISOI) Komda Yogyakarta*

#### Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : [opinikr@gmail.com](mailto:opinikr@gmail.com) dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

# Andai Saya Seorang Kepala Desa

MESKI bantuan kuota internet untuk belajar daring sudah diluncurkan, namun beberapa daerah masih belum mendapatkannya. Hal ini butuh pengawalan, pengawasan dan pendampingan agar jatah tersebut sampai di tangan yang berhak. Barangkali untuk membantu pemerintah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan

Pertama, pemerintah melalui siapapun bahkan bisa lewat program tanggung jawab sosial perusahaan memulai sedikit berempati dengan memberikan kurucuan bantuan bukan berupa dana atau uang. Artinya, mari anak-anak dari kalangan bawah diberi hadiah gadget (HP), bisa pula laptop. Tentu harus dilengkapi dengan aliran kuota internet dan sambungan jaringan listrik. Bukan hanya diberikan tidak sedikit di antaranya harus berjuang mencari sinyal di bukit, gunung atau hingga memanjat pohon tinggi dan ini sangat berisiko.

#### Sempilan Dana

Kita bisa kolaborasi membantu keluarga-keluarga yang belum beruntung tadi ikut sedikit menikmati merdeka belajar melalui pemerintah desa. Yakni lewat sempilan dana desa yang dananya sangat bisa digunakan untuk pembangunan jaringan atau Wifi. Sehingga anak-anak ini tak lesu menghadapi jadwal daring dari para guru atau sekolahnya. Atau mengajak anak-anak desa belajar di area balai desa setempat menikmati Wifi gratis.

Bagaimana keluarga berpenghasilan sebagai buruh tani, buruh serabutan atau sekadar kuli panggul maupun tukang parkir itu memenuhi kebutuhan daring anak-anaknya? Kita bayangkan, ketakutan orang tua yang hidupnya sudah susah menjadi kian susah karena tak kuasa mengimbangi tambahan be-

#### Marjono

kuota hidup, salah satunya pembelian kuota internet. Dan masih banyak 'PR' lain : apakah jaringan listrik sudah mengalir ke semua rumah tangga di desa atau desa? Apakah anak-anak sekolah di desa sudah punya HP atau belum? Kemudian, pascaakhir tahun ini, apakah masih ada keberlanjutan bantuan tersebut? Belum lagi bila persetujuan bila anak belajar di sekolah, tatap muka.

Jika anak-anak harus sekolah tatap muka, tentu perlu ada rapid tes, hand-sanitizer, pengukuran suhu tubuh, tak melakukan kontak fisik, jaga jarak dan lainnya. Bagaimana jaminan pengawasan sekolah saat anak-anak belajar? Apakah di sekolah tersedia tenaga medis yang siap selama tatap muka.

Pada wilayah lain, kita harus bangga pada sekolah atau guru yang melakukan *home visit* karena siswanya berlatar belakang keluarga berpendapatan rendah dengan melakukan pembelajaran di rumah siswa untuk menggelar kegiatan belajar mengajar. Atau terimakasih pada guru yang mengelat pembelajaran langsung di rumahnya dengan cara mengundang siswanya secara bergantian 1-2 kali seminggu untuk menuntaskan persoalan belajar siswanya.

#### Model Jimpitan

Kala ada warga yang rela sharing Wifi-nya bagi anak-anak terdekat untuk menunaikan belajar daring. Atau model jimpitan yang dikumpulkan dari iuran

sukarela setiap malam yang ditaruh di kaleng atau tempat khusus di depan rumah masing-masing dengan mengisi kocek Rp 500-Rp 1.000, dapat digunakan membantu pembelian pulsa atau kuota internet anak miskin di lingkungan tersebut. Beberapa desa bahkan kampung sudah berjalan dan hasilnya lumayan bagus.

Andai saya kepala desa, upaya itu akan saya lakukan sebagai alternatif solusi. Jika semua kepala desa atau desa sepakat serta *awareness* memberdayakan masyarakat lewat dana desa, termasuk membantu anak-anak dalam belajar daring, praktis sudah tak ada masalah. Artinya, membantu meringankan beban pemerintah yang sedang berjuang bersama seluruh masyarakat membebaskan dari agresi Covid-19. Untuk menjangkau pos dana ini, apakah masih perlu diterbitkan regulasi baru atau cukup peraturan sebelumnya yang bisa luwes untuk penanganan Covid-19? □

*\*) Marjono, Kasubag Materi Naskah Pimpinan Pemprov Jateng*

## Pojok KR

Masker, kini bukan sekadar nyaman dipakai.

-- Bisa untuk tampil trendi dan modis.

\*\*\*

Seluruh DIY masuk awal musim hujan

-- Waspada! segala kemungkinan bencana!

\*\*\*

Anggaran pendidikan tinggi naik 70%.

-- Harus disusul kenaikan kualitasnya.

*Berabe*

### Pikiran Pembaca

Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email [pikiranpembaca@gmail.com](mailto:pikiranpembaca@gmail.com). Naskah ditanggapi fotocopy atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

## Beban Kerja Kepala SMK

KEPALA sekolah adalah tenaga fungsional guru yang mendapat tugas untuk memimpin suatu sekolah sebagai tempat diselenggarakannya proses belajar mengajar atau tempat terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Berhasil atau tidaknya suatu lembaga pendidikan sangat tergantung pada kepemimpinan kepala sekolah. Sebagai pemimpin, kepala sekolah harus mampu membawa lembaganya ke arah tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan. Kepala sekolah harus mampu melihat setiap perubahan, dan masa depan dalam kehidupan globalisasi yang lebih baik. Kelancaran dan keberhasilan semua urusan pengaturan dan pengelolaan secara formal kepada atasan atau informal kepada masyarakat adalah tanggung jawab kepala sekolah yang tak terbantahkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Permendikbud, 2017: 16) tentang Beban Kerja Kepala Sekolah dalam pasal 54 ayat 1 disebutkan bahwa, Beban Kerja Kepala Satuan Pendidikan sepenuhnya untuk melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Sebagai pemimpin dan manajer, kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) harus berperan dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 dan pembelajaran abad 21, oleh karenanya kepala sekolah dituntut untuk memiliki jiwa kewirausahaan, pandai membuka ja-

ringan dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder), seperti komite sekolah, dunia usaha dan dunia kerja (Iduka) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai sinergitas dalam melaksanakan program sekolah.

Salah satu kunci untuk menyelenggarakan pendidikan SMK yang mampu menyiapkan generasi, dan beradaptasi dengan industrial revolution 4.0 adalah meningkatkan kualitas pembelajaran selaras dengan pembelajaran abad 21 yaitu terjadinya *link and match* antara pendidikan di SMK dengan industri, dunia usaha dan dunia kerja (Iduka). Dalam menghadapi revolusi industri maupun pembelajaran abad 21 kompetensi kewirausahaan merupakan salah satu kecakapan yang harus dimiliki oleh kepala SMK. Kompetensi kewirausahaan kepala SMK memiliki beberapa karakteristik di antaranya: (a) menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah, (b) bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang efektif, (c) memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah, (d) pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah, dan (e) memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan sekolah sebagai sumber belajar peserta didik. □

*Nurlaila Mahmudah, Guru Matematika SMKN 3 Yogya.*

## Kedaulatan Rakyat

**Penerus:** Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penjabat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuruya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

**Pemimpin Umum:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Drs Sihono HT, Agung Purwandono. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Gratis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

**Pemimpin Perusahaan:** Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)-565685 (Hunting)

**Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: [iklan@kr.co.id](mailto:iklan@kr.co.id), [iklankrkryk@yahoo.com](mailto:iklankrkryk@yahoo.com), [iklankrkryk13@gmail.com](mailto:iklankrkryk13@gmail.com).

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'. Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display. Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris). Rp 12.000,00/baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

**Penerbit:** PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

**Perintis:** H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percetakan:** Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab peretakan

**Alamat Homepage:** <http://www.kr.co.id> dan [www.krjogja.com](http://www.krjogja.com). **Alamat e-mail:** [naskahkr@gmail.com](mailto:naskahkr@gmail.com). **Radio:** KR Radio 107.2 FM.

**Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

**Perwakilan dan Biro:** **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

**Wartawan:** H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Samarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP.

**Banyumas:** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro: Driyanto.

**Klaten:** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro: Sri Warsiti. **Magelang:** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro: Drs M Thoha.

**Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd Kepala Biro: Asrul Sani. **Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.